ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN TATA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Oleh: Pratama Lawrance

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Gusliana HB, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 19 Pekanbaru

Email / Telepon : pratamalawrancee@gmail.com / 0852-1624-6036

ABSTRACT

Changing the status of a village to a sub-district is a government policy or effort to form a new sub-district with the aim of achieving effectiveness and efficiency in services to the community. This was carried out in order to respond to and accommodate the development and complexity of community service interests, especially at the sub-district level, including within the Bandung Regency Regional Government. The results of the study show that several villages are eligible to turn into sub-districts, namely Pamekaran Village, Sadu Village and Soreang Village. Meanwhile, other villages are not yet eligible to become sub-districts because there are several conditions that have not been met, including the area being less than large. Based on these problems, the author is interested in knowing the mechanism for changing the status of villages to sub-districts in the perspective of regional autonomy and to know the ideal concept of the mechanism for changing the status of villages and sub-districts as autonomous regions.

This type of research is classified as normative legal research. In normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Collecting data on normative legal research uses data collection techniques from a literature study. The data obtained through a literature study will be analyzed qualitatively. In drawing conclusions the author uses a deductive thinking method, namely a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition to a specific statement.

Based on the research results, it can be understood that the mechanism for changing the status of a village to a sub-district in the perspective of regional autonomy in Indonesia is regulated in Law Number 32 of 2004 in conjunction with Law Number 15 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Changing the status of a village to a sub-district from a regional autonomy perspective is a process that involves various stages and procedures in accordance with applicable regulations. It is important to involve active community participation in this process so that decisions taken can reflect the aspirations and needs of local communities. The ideal concept for changing the status of a village to a sub-district includes Feasibility Evaluation, Consultation and Participation, Administrative Preparation, Drafting Regulations, Strengthening Human Resources, Improving Public Services, Inter-Governmental Coordination, Financial Management, Evaluation and Adjustment. Changing the status of a village to a sub-district is a significant step and must be done carefully and based on good considerations. Community involvement and intergovernmental coordination are important factors that must be considered in this change process.

Keywords: Change - Village – Ward

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Sementara itu, dengan penerapan sistem desentralisasi telah menyebabkan pula terjadinya pergeseran atau pengalihan kewenangan pengurusan dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah baik pada tataran provinsi, kabupaten maupun kota. Desentralisasi merupakan cara yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang demokratis dalam suatu negara, karena sebagian kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga bisa aktif dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintahan desentralisasi merupakan hakikat dari Otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan kemudian menjadi urusan rumah tangga daerah.³

Masyarakat menginginkan birokrasi dapat menjalankan fungsi pelayanannya berdasarkan prinsip tata kelola yang memiliki netralitas politik, transparan, profesional, responsif, dan akuntabel. Dengan tuntutan ini pemerintah diharuskan dapat menjalankan birokrasi yang *good governance*.⁴

Difinisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daldjoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas.⁵

Selain ada pemerintahan dalam bentuk kelurahan, ada juga pemerintahan dalam desa. Difinisi konsep desa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 43 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 43 menentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.3.

² H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers, Palembang, 2005, hlm 37

³ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Butot, dan Utuh*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2001, hlm 23

⁵ <https://www.scribd.com>, h. 1. Diakses tanggal 1 Juni 2023

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 menegaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah?
2. Bagaimana Konsep Ideal mekanisme perubahan status Desa dan Kelurahan Sebagai Daerah Otonom?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Mekanisme Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.
- 2) Untuk mengetahui Konsep Ideal mekanisme perubahan status Desa dan Kelurahan Sebagai Daerah Otonom.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penulisan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum tata negara tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dalam perspektif otonomi daerah.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber referensi dan acuan yang jelas dalam masalah Hukum terkait perubahan status desa menjadi kelurahan.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁶ Teori juga merupakan suatu cara guna mengklasifikasi fakta, sehingga kesemua

fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.⁷ Adapun kerangka teori yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dari sudut asal usul kata berasal dari bahasa Latin, yaitu "de" a. attau lepas dan "centrum" atau pusat, jadi desentralisasi sebagai penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan kepada tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Desentralisasi menurut Rondinelli (1981) merupakan "*the transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and mnae public functions from the central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous local government, or non-governmental organizations*" (desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerntah daerah, organisasi-organisasi setengan swantra-otorita, pemerintah daerah, dan non pemerintah daerah).⁸

Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini di yakini bias menjamin segera terwujudnya good local governance. Apalagi jika di dibandingkan secara dikotomis dengan praktik sentalistik di masa lalu yang meminggirkan sebagian besar komponen masyarakat,

⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 19.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta:2006, hlm. 125.

⁸ Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averroes Press, Malang, 2005, hlm.3

pelaksanaan otonomi daerah memiliki legitimasi/justifikasi politik dan moral yang sangat kuat. Permasalahannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya otonomi, melainkan otonomi yang bagaimanakah yang bias kita andalkan untuk mewujudkan good governance ?⁹ Dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada good governance, maka pembangunan daerah dan strategi apapun yang ingin ditempuh daerah untuk mewujudkannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab elite politik, elite birokrasi dan eksponen penting dari masyarakat daerah itu sendiri.¹⁰

2. Good Governance

Jika mengacu pada program World Bank dan United Nation Development Program (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat menyatakan good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.¹¹ Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and

political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
3. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.¹⁵
4. Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai

⁹ Wibawa Samodra, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.9

¹⁰ Koirudin, *Op.Cit.*, hlm.181

¹¹ Sumodiningrat, Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 251

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm18

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

5. Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada dibawah tingkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya terkait pemerintahan desa dan kelurhaan Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum¹⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian²¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-

¹⁶ www.pengertianmenurutparaahli.net, pengertian kecamatan dan kelurahan, diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 20.00 WIB

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2006, Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1988, Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981, UI Press, Jakarta, hlm.43.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

²¹ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.149.

dokumen yang terkait engan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.²²

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan. Menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republik indonesia(NKRI).

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah. Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah sebagai penyelenggaran pelayanan publik diharuskan memiliki fungsi katalitis, mampu untuk memberdayakan masyarakat, melakukan upaya- upaya untuk mendorong semangat kompetisi, selalu berorientasi kepada misi, lebih mengutamakan dan mengutamakan hasil daripada cara atau proses, kepentingan masyarakat sebagai acuan utama, berjiwa wirausaha, dan selalu bersikap antisipatif atau berupaya mencegah timbulnya masalah, bersifat Desentralistis dan berorientasi pada pasar.²³

Daerah otonom menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nampak bahwa daerah memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) UUD RI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) disebutkan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara itu pada ayata (5) disebutkan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252

²³ Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 24

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah dan kemudian disebutkan dalam ayat (6) bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah & desentralisasi fiskal, yaitu:²⁴

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

B. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kelurahan

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar, berdasarkan adat

istiadat dan asal-usul setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.²⁶

Pada dua Undang-Undang berikutnya Desa diberikan kewenangan lebih luas (otonomi) untuk mengurus daerahnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Kata "asal-usul" tersebut dianggap menutup pintu partisipasi masyarakat, sehingga kata tersebut diubah menjadi "prakarsa" dalam Undang-Undang terbaru. Dengan menggunakan kata prakarsa diharapkan dapat mampu membuka partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat.²⁷

2. Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah

²⁴ Ichlasul Amal dan Nasikun, *Desentralisasi dan Prospeknya P3PK*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1988, hlm.16

²⁵ H.A.W. Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.3

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan, Bitra Indonesia, 2013. hlm.,2

²⁷ *Ibid*

tanggungnya sendiri.²⁸ Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Penerapan sistem desentralisasi (otonomi daerah) telah menyebabkan pula terjadinya pergeseran atau pengalihan kewenangan pengurusan dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah baik pada tataran, provinsi, kabupaten maupun kota.³⁰ Konsep dari Bank Dunia (World Bank) merumuskan bahwa kata *governance* dapat diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resource for development society*”. Dengan kata lain, “*governance is process which decision are implemented or not implemented*”. Dari pengertian tersebut diperoleh pemaknaan, bahwa istilah “*governance*” berkaitan dengan jalan atau cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber ekonomi dan sosial guna kepentingan pembangunan masyarakat melalui sebuah pengambilan keputusan.³¹

Terkait dengan itu, lebih luas Aminuddin Ilmar berpendapat, paradigma *governance* pemerintah tidak lagi sekedar bersandar pada peraturan (*rule*) atau pemerintah (*government*) semata, akan tetapi juga sudah harus melibatkan elemen lain seperti peran sektor swasta (*private*

sector) dan warga masyarakat (*civil society*).³² Sehingga menurutnya, penerapan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara pemerintah, konsep *good governance* tidak akan banyak mengubah “wajah” penyelenggaraan pemerintah.³³

Begitu pula dengan pendanaan kelurahan menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota termasuk untuk memberikan dana purnatugas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan (Pasal 11 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status desa menjadi kelurahan akan berakibat hilangnya otonomi asli desa, berubahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan, berubahnya status asset desa menjadi asset daerah dan berubahnya penggunaan anggaran.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Mekanisme Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

Paradigma pembangunan yang sentralistik dalam sejarahnya terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara luas melalui peningkatan *civil society*, sehingga tujuan pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapat tercapai. Paska runtuhnya kekuasaan orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraannya, tak terkecuali reformasi dibidang sistem pemerintahan daerah. Otonomi daerah

²⁸ C.S.T, Kansil, C.S.T, *Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 20

²⁹ Widjaja HAW, *Op. Cit.*, hlm 7

³⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Unhas, Makassar, 2013, hlm.3.

³¹ *Ibid*, hlm.20

³² *Ibid*, hlm.2

³³ *Ibid*, hlm.3

telah memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk aktif dan turut serta dalam pembangunan.³⁴

Masyarakat menginginkan birokrasi dapat menjalankan fungsi pelayanannya berdasarkan prinsip tata kelola yang memiliki netralitas politik, transparan, profesional, responsif, dan akuntabel. Dengan tuntutan ini pemerintah diharuskan dapat menjalankan birokrasi yang *good governance*.³⁵ Desa di kabupaten/kota dengan syarat tertentu secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan. Dimungkinkannya alih status desa menjadi kelurahan menyebabkan banyak wilayah desa beralih menjadi kelurahan. Berbagai alasan yang melatarbelakangi perubahan alih status ini perlu ditinjau apakah mempunyai dampak signifikan dalam aspek *good governance* khususnya dalam memenuhi aspek pelayanan umum sebagai bagian dari asas profesionalisme.

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi³⁶

Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :³⁷ “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkenaan dengan syarat-syarat untuk mengubah status desa menjadi kelurahan disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut adalah :

1. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
2. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.³⁸

Ketentuan peraturan perundang-undangan membagi persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan dalam dua aspek, yaitu aspek formal dan material. Persyaratan material, meliputi luas wilayah

³⁴ Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, 2011, hlm.1-2

³⁵ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2001, hlm. 23

³⁶ H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm.41

³⁷ Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁸ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara press, Malang, 2016, hlm 29.

tidak berubah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan meningkatnya volume pelayanan. Sementara aspek formal mulai dari adanya prakarsa dan persetujuan masyarakat sampai dengan penetapan sebagai perda. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, juga terlihat bahwa pola kebijakan yang diterapkan adalah bottom-up, yaitu diawali dengan adanya prakarsa dan persetujuan masyarakat.³⁹

Pada tahap implementasi, pola bottom up yang menjadi satu-satunya cara untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan menimbulkan adanya permasalahan dan kesulitan. Pertomo, ketika kebutuhan untuk mengubah status desa tersebut merupakan kebutuhan dari pemerintah daerah kabupaten /kota yang sudah direncanakan dalam rencana pembangunan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota hanya bisa menunggu sampai ada usulan dari bawah. Kedua, secara teknis, persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih tersebut mempunyai kerumitan tersendiri dan rentan untuk dimanipulasi.⁴⁰ Persyaratan tersebut kemudian hanya sekedar menjadi persyaratan administratif, bukan substansial demokrasi seperti yang diharapkan. Persetujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk jumlah tanda tangan dan seperti yang terjadi di lokasi penelitian, tanda tangan bisa didapat pada saat ada kegiatan yang bukan untuk kesepakatan perubahan status (misalnya: tanda tangan pada saat kerja bakti). Ketiga, akan terjadi konflik kepentingan, karena pengusulan perubahan status desa akan berimplikasi terhadap status pengusulnya (kepala desa dan perangkat desa) karena akan digantikan dengan PNS. Konflik kepentingan tersebut dapat memunculkan penolakan.⁴¹

³⁹ Novianto M. Hantoro, *Ibid*, hlm.248

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm.249

Otonomi merupakan kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Pasal 11 ayat (1) dalam UU Desa dikatakan bahwa Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Dari pasal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap otonomi serta urusan pemerintahan. Selain itu, adanya prakarsa Pemerintah Desa dan BPD menunjukkan bahwa desa memiliki otonomi sehingga pejabatnya bisa melakukan kewenangannya tetapi tidak lupa pula tetap memperhatikan pendapat masyarakat desa apabila hendak melakukan perubahan status tersebut demi kepentingan masyarakat umum. Negara Indonesia merupakan negara yang luas sehingga tidak mungkin segala urusan dari tingkat pusat sampai ke daerah di urus oleh pusat.⁴²

Maka dari itu, Negara Indonesia mengakui adanya otonomi daerah di mana Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan adanya Pasal 18 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia juga membuktikan adanya perhatian pemerintah terhadap desa yang berarti sejak Indonesia merdeka pun desa sudah dihargai lewat otonomi daerah yang pemerintah berikan.⁴³

B. Konsep Ideal mekanisme perubahan status Desa dan Kelurahan Sebagai Daerah Otonom

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat

⁴² Damanik, *Otonomi Daerah, Etonasionalisme, dan masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.45

⁴³ N.M Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.34

homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁴⁴

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat adat memiliki sifat demokratis dimana kepentingan bersama lebih di utamakan dibandingkan kepentingan perorangan. Demokrasi dan keadilan dalam masyarakat hukum adat berjalan bersama dengan nilai komunal dan gotong royong dalam masyarakat adat. Prilaku demokrasi dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan.⁴⁵

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota diwilayah kerja kecamatan.⁴⁶ Masyarakat kelurahan (perkotaan) hanya merasa satu ikatan dengan anggota perkumpulannya (profesi, olah raga, hobi, dan lainnya).

Masyarakat seperti ini disebut juga dengan masyarakat patembayan (*gesellschaft*).⁴⁷

Penerapan demokrasi di Indonesia membawa konsekuensi logis bahwa demokratisasi harus dijalankan. Salah satu agenda yang harus dilakukan adalah mendekatkan kekuasaan negara kepada rakyat melalui daerah otonom dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan keterpencilan wilayah. Semakin banyak penduduk, semakin luas, dan terpencil suatu wilayah semakin banyak pula daerah otonom yang dibutuhkan.⁴⁸

Kelurahan tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan rumah tangganya secara otonom.⁴⁹ Maka, konsep penyelenggaraan pemerintahan tidak berlandaskan pada konsep pengembangan masyarakat seperti halnya di desa, tetapi lebih mengedepankan aspek pelaksana teknis dari tugas yang diberikan oleh bupati/walikota melalui camat. Hal ini membuat fleksibilitas kinerja dari kelurahan harus bergantung pada instansi vertikal di atasnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan diantaranya adanya Inisiasi dan Permohonan, Persetujuan DPRD, Penyusunan

⁴⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, cet.II, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 242.

⁴⁶ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Op.Cit* hlm.132.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.116-120

⁴⁸ Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi: Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, cet.I, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 144.

⁴⁹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Op.Cit*, hml.132.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Persetujuan Pemerintah Pusat, Pengesahan dan Pelaksanaan, Penyesuaian Administrasi dan Pengelolaan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja. Perubahan status desa menjadi kelurahan dalam perspektif otonomi daerah adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Penting untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Perubahan status desa menjadi kelurahan dapat menjadi sebuah langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia. Pada dasarnya perubahan status desa menjadi kelurahan akan merubah struktur pemerintahan dari tingkat desa ke tingkat kelurahan. Konsep ideal perubahan status desa menjadi kelurahan diantaranya adanya Evaluasi Kelayakan, Konsultasi dan Partisipas, Persiapan Administrasi, Penyusunan Regulasi, Penguatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pelayanan Publik, Koordinasi Antar Pemerintah, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi dan Penyesuaian. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah langkah yang signifikan dan harus dilakukan dengan matang serta didasarkan pada pertimbangan yang baik. Keterlibatan masyarakat dan koordinasi antar pemerintah adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses perubahan ini.

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk pemerintahan administratif kelurahan digantikan dengan model sistem pemerintahan desa yang lebih sesuai dengan penerapan asas kedaulatan rakyat yang diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

dalam suatu konsep daerah otonom, bukan daerah administratif.

2. Perlu adanya pengkajian terhadap perubahan (desa menjadi kelurahan) terhadap pelayanan publik, sosial masyarakat, dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat memperkuat regulasi yang ada dalam rangka ulang terhadap peraturan terkait penataan desa dan kelurahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.149.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Unhas, Makassar, 2013, hlm.3.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.3.
- Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 19.
- C.S.T, Kansil, C.S.T, *Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 20
- Damanik, *Otonomi Daerah, Etonasionalisme, dan masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.45
- Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, 2011, hlm.1-2
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Butot, don Utuh*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

- H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm.41
- H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali Pers*, Palembang, 2005, hlm 37
- <https://www.scribd.com>, h. 1. Diakses tanggal 1 Juni 2023
- Ichlasul Amal dan Nasikun, *Desentralisasi dan Prospeknya P3PK*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1988, hlm.16
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2006, Bayumedia Publishing, hlm. 295.
- Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averroes Press, Malang, 2005, hlm.3
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm18
- Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi: Menyongsong Pemilihan Umum 2014, cet.I*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 144.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2001, hlm 23
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2001, hlm. 23
- N.M Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.34
- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1988, Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.
- Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara press, Malang, 2016, hlm 29.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981, UI Press, Jakarta, hlm.43.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta:2006, hlm. 125.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.116-120
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 24

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, cet.II, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 242.

Wibawa Samodra, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.9

www.pengertianmenurutparaahli.net,
pengertian kecamatan dan kelurahan,
diakses pada tanggal 25 September
2021 Pukul 20.00 WIB

1.